

Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2024

Amelia Sabila¹, Mutia Zahra², Najwa Nabila³, Yuni Artika Sari⁴, Azzhara Maya Cessy⁵, Ghurhanawan⁶

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika

Jl. Kramat Raya No. 98, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia

Email: 63230862@bsi.ac.id¹, 63230674@bsi.ac.id², 63230772@bsi.ac.id³, 63230331@bsi.ac.id⁴,
63230072@bsi.ac.id⁵, ghurhanawan.ghn@bsi.ac.id⁶

Submit:
23 June 2026

Revisi:
30 June 2026

Terima
02 Juli 2026

Terbit Online:
13 Juli 2026

ABSTRAKSI

Abstrak - Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi penggunaan anggaran sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) periode 2021–2024. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara umum berada dalam kondisi baik. Rasio efektivitas PAD menunjukkan hasil yang baik dengan nilai 92,09% pada tahun 2021, 81,94% pada tahun 2022, 101,44% pada tahun 2023, dan 100,55% pada tahun 2024, sedangkan rasio efisiensi keuangan daerah berada pada kisaran 93,96%–96,40% sehingga masih tergolong kurang efisien. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan PAD telah berjalan optimal, namun efisiensi belanja daerah masih perlu ditingkatkan. Kata Kunci: Laporan Realisasi Anggaran, Kinerja Keuangan, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

Abstracts - This study is based on the importance of evaluating local government financial performance to assess the effectiveness of Regional Original Revenue (PAD) management and the efficiency of budget utilization as a form of public financial accountability. This study aims to analyze the financial performance of the DKI Jakarta Provincial Government based on the Budget Realization Report (LRA) for the 2021–2024 period. The research employed a descriptive quantitative method using secondary data obtained from the Budget Realization Reports of the DKI Jakarta Provincial Government. The analysis focused on regional revenue and expenditure realization, the effectiveness ratio of Regional Original Revenue (PAD), and the regional financial efficiency ratio. The results indicate that the financial performance of the DKI Jakarta Provincial Government was generally in good condition. The PAD effectiveness ratio showed favorable results, reaching 92.09% in 2021, 81.94% in 2022, 101.44% in 2023, and 100.55% in 2024, indicating effective to highly effective performance. Meanwhile, the regional financial efficiency ratio ranged from 93.96% to 96.40%, indicating that financial management was still categorized as less efficient. These findings suggest that regional revenue management has been optimized; however, greater efforts are still needed to improve the efficiency of regional expenditure.

Keywords: Budget Realization Report, Financial Performance, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Regional Original Revenue (PAD).

1. PENDAHULUAN

Anggaran merupakan komponen krusial dalam manajemen keuangan, baik di sektor publik maupun swasta. Dalam tata kelola pemerintahan, anggaran berfungsi tidak hanya sebagai rencana pendapatan dan belanja, tetapi juga sebagai alat akuntabilitas untuk memastikan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien (Zuri et al., 2026). Di Indonesia, pemerintah daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi dasar

pelaksanaan program pembangunan daerah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, pemerintah daerah menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah komponen pelaporan keuangan pemerintah yang menyajikan perbandingan antara anggaran yang ditetapkan pada awal periode dengan capaian nyata pada akhir periode. Sebagaimana dikemukakan oleh (Sabono &

Sahusilawane, 2024) LRA menggambarkan bagaimana sumber daya keuangan yang dikelola pemerintah daerah digunakan dan dialokasikan, serta mengilustrasikan perbandingan antara alokasi anggaran dan capaian aktual selama suatu periode pelaporan. Unsur-unsur utama dalam LRA meliputi:

Analisis terhadap Laporan Realisasi Anggaran memiliki peran penting dalam mengevaluasi kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, mengidentifikasi potensi penyimpangan atau ketidaktepatan alokasi anggaran, serta menjadi dasar pengambilan keputusan strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah (Djemma et al., 2023). Lebih dari itu, analisis LRA juga bermanfaat sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan pemerintah (Aulia et al., 2023).

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan ukuran prestasi kerja di bidang keuangan yang mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menggali, mengelola, dan memanfaatkan sumber-sumber keuangan asli daerah untuk memenuhi kebutuhan operasional pelayanan publik (Hafizi & Amalia, 2022). Selain itu, kinerja keuangan juga mencerminkan kemampuan daerah dalam mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Pradana & Handayani, 2023). Untuk mengukur kinerja keuangan daerah secara komprehensif, diperlukan analisis rasio keuangan. Dua rasio utama yang lazim digunakan adalah sebagai berikut:

1. Rasio Efektivitas Pendapatan merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk mengukur dan merealisasikan pendapatan yang telah direncanakan dan nantinya akan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi dan anggaran perusahaan (Setiawan & Lita, 2022) Semakin tinggi nilai rasio efektivitas, semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan.
2. Rasio efisiensi adalah rasio yang membandingkan antara input yang digunakan terhadap output yang dihasilkan. Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Nurwana & Purwanto, 2023) Jika rasio yang dihasilkan kurang dari 100%, maka dapat dikatakan kinerja pemerintah daerah tersebut efisien. Semakin rendah rasio Efisiensi, semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat perekonomian mengelola anggaran yang sangat besar dan kompleks. Periode 2021–2024 menjadi sangat penting untuk dianalisis karena mencakup masa pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, di mana pemerintah daerah menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan kebutuhan belanja dengan kapasitas penerimaan daerah (Praditya & Yusuf, 2025). Beberapa penelitian terdahulu telah

menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah melalui LRA, antara lain (Rohmad et al., 2023) pada Pemerintah Kabupaten Tebo, (Alya Nurhasani et al., 2026) pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta (Halijah & Nurwani, 2022) pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Medan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realisasi pendapatan dan belanja daerah Pemprov DKI Jakarta periode 2021–2024; dan menganalisis tingkat efektivitas PAD serta efisiensi keuangan daerah selama periode tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja keuangan DKI Jakarta serta menjadi bahan evaluasi kebijakan fiskal daerah di masa mendatang (Pardede, 2024).

Penelitian yang relevan merupakan kajian terhadap penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hasil penelitian sebelumnya serta menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian yang dilakukan. Ringkasan penelitian yang relevan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Penelitian yang Relevan

Nama	Judul
(Alya Nurhasani et al., 2026)	Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 2022-2024
(Aulia et al., 2023)	Analisis Laporan Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2019-2021.
(Widodo et al., 2025)	Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2023.

Sumber:(Sabila et al,2026)

Berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat diketahui adanya persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Temuan tersebut menjadi dasar dalam menyusun kerangka berpikir yang menggambarkan hubungan antarvariabel penelitian. Kerangka berpikir ini digunakan sebagai acuan dalam menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun kerangka berpikir penelitian disajikan sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber:(Sabila et al,2026)

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, yaitu menggambarkan dan menganalisis kinerja keuangan Pemprov DKI Jakarta berdasarkan data angka yang tersaji dalam laporan keuangan. Objek penelitian adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2021–2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang tersedia pada website resmi Pemprov DKI Jakarta.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yakni mengumpulkan dan menelaah dokumen LRA selama periode penelitian. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: (1) deskripsi realisasi pendapatan dan belanja daerah berdasarkan komponen LRA; (2) penghitungan rasio efektivitas PAD menggunakan formula Realisasi PAD dibagi Target PAD dikali 100%; dan (3) penghitungan rasio efisiensi keuangan daerah menggunakan formula Realisasi Belanja dibagi Realisasi Pendapatan dikali 100%. Hasil perhitungan kemudian dibandingkan dengan kriteria penilaian standar yang berlaku dalam evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) selama empat tahun anggaran, yaitu tahun 2021 hingga 2024. Analisis mencakup tiga aspek utama, yakni deskripsi realisasi pendapatan dan belanja daerah, analisis rasio efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta analisis rasio efisiensi keuangan daerah.

3.1.1 Analisis Realisasi Pendapatan dan Belanja daerah

Selama periode 2021–2024, realisasi total pendapatan daerah Pemprov DKI Jakarta menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2021, total realisasi pendapatan tercatat sebesar Rp65,57 triliun, yang terdiri dari PAD Rp41,61 triliun, Pendapatan Transfer Rp22,67 triliun, dan Pendapatan Lain-Lain Rp1,29 triliun. Tahun 2022 mencatat total pendapatan Rp67,29 triliun dengan PAD Rp45,61 triliun, Transfer Rp18,86 triliun, dan Pendapatan Lain-Lain Rp2,82 triliun. Penurunan transfer dari pusat pada tahun 2022 dikompensasi oleh kenaikan PAD yang cukup signifikan.

Pada tahun 2023, total realisasi pendapatan meningkat menjadi Rp71,07 triliun dengan PAD Rp49,14 triliun, transfer Rp20,16 triliun, dan pendapatan Lain-Lain Rp1,77 triliun. Momentum pemulihan ekonomi pascapandemi menjadi faktor pendorong kenaikan PAD yang konsisten. Selanjutnya, pada tahun 2024, total pendapatan mencapai Rp72,95 triliun dengan PAD Rp50,74 triliun, transfer Rp21,62 triliun, dan pendapatan Lain-Lain Rp0,59 triliun. Secara keseluruhan, PAD tumbuh sekitar 21,9% dari 2021 ke 2024, mencerminkan

upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah yang berhasil.

Dari sisi belanja, realisasi total belanja daerah (termasuk transfer) juga meningkat setiap tahunnya. Tahun 2021 mencatat total belanja Rp61,62 triliun, meningkat menjadi Rp64,87 triliun pada 2022, lalu Rp66,77 triliun pada 2023, dan Rp70,01 triliun pada 2024. Komponen belanja operasi mendominasi dengan porsi terbesar: Rp53,93 triliun (2021), Rp55,54 triliun (2022), Rp57,56 triliun (2023), dan Rp58,62 triliun (2024). Belanja modal juga menunjukkan peningkatan signifikan dari Rp6,87 triliun (2021) menjadi Rp11,00 triliun (2024), mencerminkan akselerasi investasi pembangunan infrastruktur daerah. Yang menarik, pada setiap tahun anggaran terjadi surplus realisasi karena realisasi pendapatan selalu melampaui total belanja yang dikeluarkan, sehingga menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang cukup besar, yaitu Rp9,72 triliun (2021), Rp8,60 triliun (2022), Rp6,54 triliun (2023), dan Rp4,43 triliun (2024).

3.1.2. Analisis Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD dihitung dengan membagi realisasi PAD terhadap target PAD yang ditetapkan dalam APBD, dikalikan 100%. Dengan rumus sebagai berikut:

Rasio Efektivitas

$$= \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Dan pendapatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Rasio Efektivitas Keuangan Daerah.

Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
<75	Tidak Efektif

Sumber: (Alya Nurhasani et al., 2026)

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, diperoleh hasil seleksi penelitian yang memenuhi kriteria untuk dianalisis lebih lanjut. Hasil tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Rasio Efektivitas PAD Pemprov DKI Jakarta Tahun 2021–2024

Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Rasio Efektivitas	Kriteria
41.606.307.405.630	45.182.087.250.967	92,09%	Efektif
45.608.404.729.501	55.662.834.753.592	81,94%	Cukup Efektif
49.139.745.715.234	48.442.043.648.831	101,44%	Sangat Efektif
50.742.019.272.748	50.466.744.400.403	100,55%	Sangat Efektif

Sumber: (Data diolah dari LRA Pemprov DKI Jakarta, 2021–2024)

Berdasarkan Tabel 3, rasio efektivitas PAD Pemprov DKI Jakarta berfluktuasi namun menunjukkan tren positif. Pada tahun 2021, rasio efektivitas sebesar 92,09% (Efektif), dipengaruhi dampak pandemi COVID-19 yang menekan aktivitas perekonomian, terutama sektor pajak daerah. Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 81,94% (Cukup Efektif) karena target PAD ditetapkan terlalu tinggi sebesar Rp55,66 triliun, sementara realisasi hanya mencapai Rp45,61 triliun, selisih sebesar Rp10,05 triliun atau sekitar 18%.

Pembalikan tren yang signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana rasio efektivitas melonjak menjadi 101,44% (Sangat Efektif), menandakan Pemprov DKI Jakarta berhasil melampaui target PAD sebesar Rp0,70 triliun. Keberhasilan ini berlanjut di tahun 2024 dengan rasio 100,55% (Sangat Efektif), di mana realisasi PAD Rp50,74 triliun melampaui target Rp50,47 triliun sebesar Rp0,28 triliun. Konsistensi kategori Sangat Efektif selama dua tahun berturut-turut mengindikasikan bahwa manajemen pendapatan daerah semakin optimal, didukung pemulihan ekonomi yang kuat serta intensifikasi pemungutan pajak daerah.

3.1.3. Analisis Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah dihitung dengan membagi realisasi belanja dan transfer terhadap realisasi pendapatan daerah, dikalikan 100%. Dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Rasio Belanja Daerah}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Kriteria efisiensi kinerja keuangan sebagai berikut:

Tabel 4. Kriteria Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
<60	Sangat Efisien
60-80	Efisien
80-90	Cukup Efisien
90-100	Kurang Efisien
>100	Tidak Efisien

Sumber: (Alya Nurhasani et al., 2026)

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, diperoleh hasil seleksi penelitian yang memenuhi kriteria untuk dianalisis lebih lanjut. Hasil tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. Rasio Efisiensi Keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2021–2024

Realisasi Belanja dan Transfer (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio Efisiensi	Kriteria
61.619.040.160.565	65.567.009.199.000	93,98%	Kurang Efisien
64.865.121.2	67.290.479.	81,94%	Kurang Efisien

20.296	172.308		
66.770.609.628.414	71.065.534.207.722	93,96%	Kurang Efisien
70.012.717.839.886	72.952.092.296.153	95,97%	Kurang Efisien

Sumber: (Data diolah dari LRA Pemprov DKI Jakarta, 2021–2024)

Berdasarkan Tabel 5, rasio efisiensi keuangan daerah Pemprov DKI Jakarta selama empat tahun anggaran secara konsisten berada pada kategori Kurang Efisien (90%–100%). Pada tahun 2021, rasio efisiensi sebesar 93,98%, artinya dari setiap Rp100 pendapatan yang diterima, digunakan Rp93,98 untuk membiayai belanja dan transfer. Tahun 2022 mencatat rasio tertinggi sebesar 96,40%, berkaitan dengan akselerasi program pembangunan pasca pandemi yang meningkatkan proporsi belanja. Sementara itu, tahun 2023 menunjukkan perbaikan relatif dengan rasio 93,96%, lalu tahun 2024 kembali meningkat menjadi 95,97%.

Meskipun secara konsisten masuk kategori Kurang Efisien, terdapat fakta penting yang perlu digarisbawahi: Pemprov DKI Jakarta tidak pernah sekalipun mengalami defisit anggaran selama empat tahun tersebut. Realisasi pendapatan selalu melebihi realisasi belanja, menghasilkan surplus yang berkisar antara Rp2,94 triliun hingga Rp4,29 triliun per tahun. Kondisi ini menggambarkan manajemen fiskal yang prudent (berhati-hati). Kategori Kurang Efisien lebih mencerminkan tingginya proporsi belanja operasional terutama pada kota metropolitan berskala besar dibandingkan indikasi pemborosan anggaran. Untuk meningkatkan rasio efisiensi, diperlukan pengendalian belanja operasional yang lebih ketat serta pengalihan alokasi yang lebih besar ke belanja modal yang berdampak jangka panjang bagi masyarakat.

3.2 Pembahasan Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta periode 2021–2024 secara umum berada dalam kondisi yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami peningkatan, yaitu sebesar 92,09% pada tahun 2021, 81,94% pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 101,44% pada tahun 2023 dan 100,55% pada tahun 2024, sehingga berada pada kategori efektif hingga sangat efektif. Sementara itu, rasio efisiensi keuangan daerah berada pada kisaran 93,96%–95,97% sehingga masih tergolong kurang efisien. Meskipun demikian, kondisi fiskal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap baik karena realisasi pendapatan mampu menutupi realisasi belanja, sehingga menghasilkan surplus anggaran dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) setiap tahunnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Widodo et al., 2025) yang menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD pada periode 2021–2023 berfluktuasi, yaitu sebesar 92,09% pada tahun 2021, 81,94% pada tahun 2022, dan meningkat menjadi 101,44% pada

tahun 2023, sedangkan rasio efisiensi keuangan daerah juga berada pada kategori kurang efisien.

Persamaan kedua penelitian terletak pada objek penelitian, yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, penggunaan metode deskriptif kuantitatif dengan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), serta penggunaan rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi keuangan daerah sebagai indikator dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, kedua penelitian menyimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara umum berada dalam kondisi yang baik karena pemerintah daerah mampu mengoptimalkan penerimaan PAD meskipun efisiensi penggunaan anggaran masih perlu ditingkatkan.

Perbedaannya, penelitian terdahulu hanya menganalisis periode 2021–2023, sedangkan penelitian ini memperluas periode hingga 2024, sehingga memberikan gambaran perkembangan kinerja keuangan yang lebih mutakhir. Penelitian ini juga tidak hanya menganalisis rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi keuangan daerah, tetapi turut mengkaji perkembangan realisasi pendapatan dan belanja daerah. Penambahan periode analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2024 rasio efektivitas PAD tetap berada pada kategori sangat efektif sebesar 100,55%, sehingga memperkuat temuan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu mempertahankan kinerja pengelolaan pendapatannya, meskipun efisiensi belanja daerah masih perlu terus dioptimalkan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis LRA Pemerintah Provinsi DKI Jakarta periode 2021–2024, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah secara umum menunjukkan kondisi yang positif dan relatif stabil. Pertama, realisasi total pendapatan daerah mengalami pertumbuhan konsisten dari Rp65,57 triliun (2021) menjadi Rp72,95 triliun (2024), didominasi oleh kenaikan PAD yang mencerminkan kemandirian fiskal daerah yang semakin baik. Realisasi belanja juga meningkat namun selalu berada di bawah realisasi pendapatan, sehingga setiap tahun menghasilkan surplus anggaran.

Kedua, rasio efektivitas PAD menunjukkan perbaikan yang signifikan dari waktu ke waktu. Setelah sempat berada pada kategori Efektif (2021) dan Cukup Efektif (2022) akibat dampak pandemi dan penetapan target yang terlalu tinggi, rasio efektivitas PAD berhasil melampaui 100% pada tahun 2023 (101,44%) dan 2024 (100,55%), masuk kategori Sangat Efektif.

Ketiga, rasio efisiensi keuangan daerah berada di kisaran 93–97% selama empat tahun, masuk kategori Kurang Efisien, meskipun pemerintah daerah tidak pernah mengalami defisit anggaran yang menandakan manajemen fiskal yang prudent.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk:

1. Bagi Pembaca: Penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi dalam memahami analisis Laporan Realisasi Anggaran sebagai alat untuk menilai kinerja keuangan pemerintahan daerah.
2. Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disarankan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan belanja daerah, terutama belanja operasional, serta mempertahankan efektivitas PAD melalui penetapan target yang realistis dan optimalisasi sumber-sumber pendanaan daerah.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya: Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan indikator rasio keuangan lainnya serta memperluas objek dan periode penelitian.

REFERENSI

- Alya Nurhasani, Ade Budi Setiawan, Dea Julfani, Firda Fauziah, Hilman Ariyansyah, & Marisa Talia Putri. (2026). Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 – 2024. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 6(1), 42–51. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v6i1.8223>
- Aulia, A. N., Saputri, Z. E. N., & Bharata, R. W. (2023). Analisis laporan keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Magelang tahun anggaran 2019-2021. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(3), 76–85.
- Djemma, S. A., Nurwana, A., & AB, R. I. (2023). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Perkimta Sengkang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 4310–4321.
- Hafizi, R., & Amalia, F. A. (2022). Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jember. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 116–130.
- Halijah, N., & Nurwani, N. (2022). Analisis Pendapatan Dalam Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(4), 365–372.
- Nurwana, A., & Purwanto, A. (2023). Analisis kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan rasio efektivitas dan rasio efisiensi pada Kantor Desa Leppang Kabupaten Bone. *Precise Journal of Economic*, 2(1), 9–17.
- Pardede, L. P. N. (2024). Analisis Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Mengukur Kinerja Keuangan Kabupaten Kendal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 467–473.

- Pradana, E. Y., & Handayani, N. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (Jiaku)*, 2(2), 192–209.
- Praditya, R. A., & Yusuf, A. M. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018-2023. *Kinerja: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 22(1), 45–54.
- Rohmad, M., Isma, A., & Ramli, F. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo. *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*, 5(1), 17–35.
- Sabono, H. Y., & Sahusilawane, W. (2024). Analisis Laporan Realisasi Anggaran dalam Mengukur Kinerja Keuangan Desa. *Journal of Student Research*, 2(1), 326–336.
- Setiawan, Y. A., & Lita, N. E. (2022). Analisis Efektivitas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Selama Pandemi Covid-19 di RSUD Cilacap. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 5(2), 132–143.
- Widodo, A. A., Riyanti, D. A., Dani, F. R., Abdillah, M. E., & Siboro, S. F. (2025). Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2023. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(5), 319–329.
- Zuri, R. P., Syawalina, C. F., & Agustina, M. (2026). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1), 3928–3939.